

**REPRESENTASI KONFLIK SOSIAL PADA MASYARAKAT PASAMAN
DALAM NOVEL *JEJAK BALAK* KARYA AYU WELIRANG
(KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA RALF DAHRENDORF)**

Rahma Irni Dianaliza

Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya
rahmairni.22009@mhs.unesa.ac.id

Parmin

Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya
parmin@unesa.ac.id

Abstrak

Ketegangan yang dibangun oleh otoritas, kepentingan korporasi, dan kepercayaan mitologis masyarakat lokal dalam merespon fenomena kematian misterius di kawasan hutan adat menjadi latar belakang penelitian ini. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan representasi konflik sosial dalam novel *Jejak Balak* karya Ayu Welirang berdasarkan perspektif Ralf Dahrendorf, yakni dua wajah masyarakat, kekuasaan dan wewenang, kelompok terlibat konflik, dan pengendalian konflik. Pendekatan sosiologi sastra diterapkan pada penelitian ini dengan data penelitian berupa kalimat, penggalan paragraf, dan kutipan dialog dalam novel yang sesuai dengan rumusan masalah. Sumber data penelitian menggunakan novel *Jejak Balak* karya Ayu Welirang. Teknik baca, teknik catat, dan teknik dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Teknik deskriptif analitis diterapkan sebagai teknik analisis. Hasil penelitian ditemukan (1) Dua wajah pada konsensus direpresentasikan melalui regulasi dan kerja sama dalam pengelolaan hutan adat. Sementara itu, konflik dalam novel direpresentasikan dalam bentuk pertikaian antarindividu, konflik ekologis, dan perlawanan masyarakat terhadap dominasi korporasi; (2) Kekuasaan direpresentasikan melalui pengendalian narasi media dan praktik suap antara korporasi dengan aparat. Sedangkan wewenang direpresentasikan melalui pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada legitimasi hukum dan kelembagaan; (3) Kelompok yang terlibat dalam konflik meliputi kelompok semu yang belum terorganisasi, kelompok kepentingan yang memiliki tujuan bersama dan struktur yang jelas, dan kelompok konflik yang secara aktif memperjuangkan kepentingannya dalam pertentangan sosial; (4) Pengendalian konflik direpresentasikan melalui mekanisme arbitrase yang tidak berjalan secara netral sehingga penyelesaian konflik cenderung menguntungkan kelompok yang memiliki kekuatan lebih besar.

Kata Kunci: Ralf Dahrendorf, Konflik Sosial, Kekuasaan, Wewenang

Abstract

This study's backdrop is the conflict between local communities' mythical beliefs, business interests, and authorities over unexplained deaths in traditional forest areas. Based on Ralf Dahrendorf's viewpoint, this study explains how social conflict is portrayed in Ayu Welirang's novel Jejak Balak, specifically the two sides of society, power and authority, organizations engaged in conflict, and conflict control. Sentences, paragraphs, and conversation quotes relevant to the problem formulation serve as research material for this study, which uses a literary sociological methodology. The novel Jejak Balak by Ayu Welirang serves as the study's data source. Data collection techniques use reading techniques, note-taking techniques and documentation techniques, while data analysis employs descriptive analytical methods. According to the findings, The findings reveal that (1) the two faces of society are represented through consensus, manifested in regulations and cooperation in the management of customary forests, and through conflict, reflected in interpersonal disputes, ecological conflicts, and community resistance against corporate domination; (2) power is represented through the control of information and bribery practices conducted by corporations, while authority is represented through decision-making processes and the execution of duties based on legal and institutional legitimacy; (3) the groups involved in the conflict consist of quasi-groups that share common interests but lack organization, interest groups that possess clear objectives and structured coordination, and conflict groups that actively engage in social struggles to defend their interests; and (4) conflict control is represented through arbitration mechanisms that fail to operate impartially, resulting in conflict resolution processes that tend to favor more powerful groups.

Keywords: Ralf Dahrendorf, Social Conflict, Power, Authority

PENDAHULUAN

Novel *Jejak Balak* karya Ayu Welirang mengisahkan berbagai permasalahan sosial yang terjadi di Pasaman, Sumatera Barat. Proses investigasi mengenai kematian dua pembalak liar diceritakan melalui tokoh Dima Sawitri, Seorang Jurnalis muda di Kaba Jorong. Dalam penyelidikannya bersama Timur, kasus kematian tersebut tidak sesederhana yang dinyatakan oleh pihak kepolisian. Meskipun kematian korban secara resmi disebut sebagai akibat serangan harimau, berbagai bukti dan rumor yang berkembang di masyarakat mengarah pada keterlibatan inyik atau roh penjaga hutan yang diyakini murka akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pembalakan liar. Di balik peristiwa tersebut, berbagai permasalahan struktural yang melibatkan masyarakat, aparat penegak hukum, dan perusahaan kelapa sawit PT Zamrud Bumi tercermin dalam novel ini. Pertikaian yang muncul tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekologis dan kriminalitas, tetapi juga ditandai oleh pertentangan kepentingan, relasi kekuasaan, dan perebutan wewenang antarkelompok sosial.

Konflik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berdasarkan perspektif teori konflik, masyarakat tidak selamanya berada dalam kondisi yang tertib dan stabil. Setiap masyarakat, dalam berbagai bentuknya, pasti pernah mengalami konflik atau pertikaian yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan di antara kelompok-kelompok sosial (Tualeka, 2017: 347). Konflik dianggap sebagai elemen penting yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Keteraturan dalam masyarakat, menurut teori konflik, tidak tercipta secara sukarela, melainkan terbentuk melalui paksaan atau koersi. Dengan demikian, teori konflik sangat erat kaitannya dengan konsep dominasi, paksaan (koersi), dan kekuasaan (*power*), karena ketiganya menjadi mekanisme utama dalam mempertahankan struktur sosial. Sebaliknya, konsensus berpendapat bahwa masyarakat dapat bersatu karena adanya nilai-nilai bersama yang disepakati, yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Dengan demikian, kehidupan sosial pada dasarnya menampilkan dua wajah yang saling berkaitan, yaitu konflik dan konsensus.

Menurut Dahrendorf (Dahrendorf, 1986: 203), wewenang (*Herrschaft*) merupakan kemampuan untuk memerintah yang secara sukarela ditaati karena dianggap sah oleh pihak yang berada di bawahnya. Dalam wewenang selalu terdapat struktur sosial yang tersusun, yakni antara pihak yang menduduki posisi lebih tinggi (superior) dan pihak yang berada di posisi lebih rendah (subordinat). Pihak superior memiliki legitimasi untuk

mengatur, memerintah maupun melarang tindakan pihak subordinat. Sementara itu, Dahrendorf (1986: 202) mengadopsi konsep kekuasaan dari Max Weber yang mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan suatu posisi dalam hubungan sosial untuk memaksakan kehendaknya sendiri, meskipun terdapat penolakan atau perlawanan dari pihak lain. Dengan demikian, kekuasaan dan wewenang menjadi faktor penting yang memengaruhi hadirnya konflik dalam masyarakat.

Selain, konsep kekuasaan dan wewenang, Dahrendorf (1986: 222—225) juga menjelaskan kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik. Ia membedakan menjadi kelompok semu (*quasi group*), kelompok kepentingan (*interest group*), dan kelompok konflik (*conflict group*). Kelompok semu merupakan kumpulan individu yang memiliki kesamaan kepentingan, tetapi belum terdapat kesadaran dan organisasi yang jelas. Kelompok ini dapat berkembang menjadi kelompok kepentingan yang memiliki struktur organisasi dan tujuan tertentu yang jelas. Selanjutnya, kelompok kepentingan dapat berkembang menjadi kelompok konflik yang secara sadar dan aktif terlibat dalam pertentangan untuk mempertahankan kepentingannya. Melalui konsep tersebut, teori Dahrendorf dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang berkonflik dalam novel dan dinamika yang terjadi di antara mereka.

Dahrendorf (dalam Surbakti, 2007: 160) menjelaskan bahwa konflik tidak selalu berakhir dengan tindak kekerasan, tetapi dapat dikendalikan melalui berbagai mekanisme, seperti konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Pengendalian konflik bertujuan mengurangi ketegangan yang muncul akibat perbedaan kepentingan sekaligus membuka peluang terjadinya perubahan sosial. Oleh karena itu, konsep pengendalian konflik juga penting untuk digunakan dalam menganalisis penyelesaian berbagai konflik yang terdapat dalam novel *Jejak Balak*.

Penelitian mengenai novel *Jejak Balak* telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Anindita (2025) dengan judul “Kisah Tanah Ulayat dalam Novel *Jejak Balak* Karya Ayu Welirang (Tinjauan Sosiologi Sastra)” menemukan bahwa konflik tanah ulayat dalam novel dimanifestasikan melalui konflik antara masyarakat adat dan perusahaan, konflik antara masyarakat adat dan pemerintah, dan konflik internal dalam masyarakat adat. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Agnes (2024) dengan judul “Novel *Jejak Balak* karya Ayu Welirang : Kajian Formula Cawelti” menemukan adanya formula misteri detektif klasik, dan unsur eskapisme dalam novel.

Teori konflik Dahrendorf telah digunakan dalam penelitian pada objek yang berbeda. Penelitian yang

dilakukan oleh Amanda, A., & Fatoni A., (2025) yang berjudul “Konflik Sosial dalam Novel *Laut Bercerita* Karya Leila S Chudori (Sebuah Analisis Sosiologi Sastra)” menunjukkan bahwa konflik dalam novel melibatkan kelompok masyarakat yang berhadapan dengan aparat militer sebagai representasi kekuasaan pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Ghuffran, M., Nugraha, D. A., & Pulungan, N. N. S. R. (2024) dengan judul “Analisis Kasus Pulau Rempang di Batam Ditinjau dari *Conflict Theory*” menemukan bahwa konflik terjadi akibat pertentangan antar kepentingan pembangunan dan upaya masyarakat mempertahankan tanah warisan leluhur.

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian terhadap novel *Jejak Balak* dari perspektif sosiologi sastra Alan Swingewood dan formula sastra populer, sedangkan penelitian yang secara khusus novel *Jejak Balak* dengan teori konflik Dahrendorf belum ditemukan. Selain itu, Penelitian terdahulu yang menerapkan teori konflik Dahrendorf mengkaji objek yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada representasi konflik sosial masyarakat Pasaman dalam novel *Jejak Balak* karya Ayu Welirang melalui aspek dua wajah masyarakat, yang terdiri dari konflik dan konsensus, kekuasaan dan wewenang, kelompok yang terlibat, dan pengendalian konflik menurut Dahrendorf.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi sastra yang dilatarbelakangi oleh fakta bahwa keberadaan karya sastra tidak dapat lepas dari realitas sosial yang terjadi di suatu masyarakat. Dalam pendapatnya, Parmin (2016) menyatakan bahwa dasar filosofis pendekatan sosiologis adalah adanya hubungan hakiki antara karya sastra dan masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini berupa novel *Jejak Balak* karya Ayu Welirang yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada November 2023, dengan data penelitian berupa kutipan narasi, monolog dan dialog dalam novel *Jejak Balak* karya Ayu Welirang yang mengandung bentuk konflik menurut Ralf Dahrendorf, yakni konsep dua wajah masyarakat, kekuasaan dan wewenang, kelompok yang terlibat dalam konflik, dan pengendalian konflik.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teknik baca, teknik catat, dan teknik dokumentasi. Menurut Faruk (2020: 24) teknik pengumpulan data merupakan serangkaian metode yang berfungsi sebagai perpanjangan dari indera manusia, yang bertujuan memperoleh fakta-fakta empiris yang relevan dengan permasalahan dalam peneliti. Teknik baca dilakukan dengan membaca novel *Jejak Balak* karya Ayu Welirang secara cermat dan berulang untuk

mengidentifikasi data yang berkaitan dengan dua wajah masyarakat, kekuasaan dan wewenang, kelompok yang terlibat, dan pengendalian konflik berdasarkan teori konflik Dahrendorf. Data yang ditemukan dicatat dalam bentuk kutipan narasi, monolog dan dialog. Selanjutnya, teknik dokumentasi diterapkan untuk mengumpulkan, mengarsipkan, dan mengklasifikasikan kutipan-kutipan sesuai dengan klasifikasinya. Teknik dokumentasi juga digunakan dalam pengumpulan berbagai referensi pendukung, seperti buku, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan sosiologi sastra dan teori konflik Dahrendorf sebagai landasan analisis data. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut.

- Membaca novel *Jejak Balak* karya Ayu Welirang secara cermat.
 - Menandai kalimat, penggalan paragraf, dan kutipan dialog yang relevan dengan rumusan masalah dalam novel *Jejak Balak* karya Ayu Welirang dengan cara memberikan garis bawah.
- Dima menggeleng, kemudian menjawab, "Pastinya gue bikin masalah lagi kan, Bang?"
 "Dim!" sergah Dayat, redaktornya. Pria berkepala plontos yang mirip Agastya Kandou itu melanjutkan, "Lo bisa nggak sih, jangan cari ribut dulu?" ool
- Mengklasifikasikan data yang telah ditemukan ke dalam tabel klasifikasi data sesuai dengan kategori yang telah ditentukan.
 - Mencentang kutipan data yang sesuai dengan rumusan masalah, yakni mengenai dua wajah masyarakat, konsep kekuasaan dan wewenang, kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik, dan pengendalian konflik.

Tabel Klasifikasi Data Konflik Sosial dalam Novel Jejak Balak Berdasarkan Teori Konflik Dahrendorf

No. Data	Kutipan Data	DW		KW		KK		PK		Interpretasi
		KN S	KFL	KK S	WW N	KL PS	KL PK	KL K	PKA	
01	Dima menggeleng, kemudian menjawab, "Pastinya gue bikin masalah lagi kan, Bang?" "Dim!" sergah Dayat, redaktornya. Pria berkepala plontos yang mirip Agastya Kandou itu melanjutkan, "Lo bisa nggak sih, jangan cari ribut dulu?" (Welirang, 2023:11)		✓							Tindakan Dayat yang berusaha meredakan konflik menunjukkan bahwa keharmonisan dalam lingkungan kerja tidak selalu terbentuk secara sukarela, melainkan melalui koersi.

Keterangan

DW	= Dua Wajah Masyarakat
KW	= Kekuasaan dan Wewenang
KK	= Kelompok yang Terlibat Konflik
PK	= Pengendalian Konflik
KNS	= Konsensus
KFL	= Konflik
KKS	= Kekuasaan
WWN	= Wewenang
KLPS	= Kelompok Semu
KLPK	= Kelompok Kepentingan
KLKK	= Kelompok Konflik
PKA	= Pengendalian Arbitrase

Pada penelitian ini diterapkan teknik analisis deskriptif analitis. Menurut Ratna (2015: 53), metode deskriptif analitik dilakukan dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang terdapat dalam teks, bukan hanya menguraikan isi secara permukaan, melainkan juga menggali makna yang terkandung di balik teks secara mendalam. Dalam penelitian ini, data dianalisis melalui pembacaan ulang kutipan yang telah diklasifikasikan, kemudian dipilih data yang relevan dengan rumusan masalah. Selanjutnya, kutipan dideskripsikan berdasarkan konteks naratif untuk mendapatkan pemahaman yang utuh. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dan disimpulkan berdasarkan teori konflik Dahrendorf.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Empat rumusan masalah yang berkaitan dengan representasi konflik sosial pada masyarakat Pasaman dalam novel *Jejak Balak* karya Ayu Welirang akan dijawab dalam pembahasan penelitian ini. Pertama, dua wajah masyarakat yang terdiri dari konflik dan konsensus. Kedua, kekuasaan dan wewenang yang direpresentasikan melalui tokoh-tokoh dalam novel. Ketiga, kelompok yang terlibat terdiri dari kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok konflik. Keempat, pengendalian konflik direpresentasikan dalam bentuk arbitrase.

1. Dua Wajah Masyarakat dalam Novel *Jejak Balak* Karya Ayu Welirang

a. Konflik

Sebagai bagian dari dinamika sosial, setiap masyarakat pasti pernah terjadi konflik. Konflik dapat mendorong perubahan sosial melalui paksaan atau koersi yang berkaitan erat dengan dominasi dan kekuasaan. Konflik dapat terbentuk melalui ketegangan antar individu hingga perlawanan kolektif masyarakat terhadap dominasi korporasi. Dalam novel *Jejak Balak* karya Ayu Welirang, konflik tersusun secara berlapis. Hal tersebut tampak pada kutipan data berikut.

Data 28

Dia pun berkata, "Kalian tak salah, hanya saja kalian mengacaukan rencanaku. Aku harus mengembalikan keseimbangan alam. Membunuh para pemburu hewan yang dilindungi, pembalak, dan perampas tanah leluhur."

"Apa pun rencana kau, Bang, membunuh bukanlah hal yang pantas dilakukan!" seru Timur lagi. (Welirang, 2023: 324)

Data tersebut dapat dimaknai bahwa konflik telah berkembang menjadi konflik antara keyakinan personal dengan norma sosial yang berlaku. Pernyataan tokoh yang ingin mengembalikan keseimbangan alam dengan tindakan membunuh pemburu satwa yang dilindungi, pelaku pembalak liar, dan perampas tanah leluhur menunjukkan bahwa pelaku memiliki sistem nilai dan justifikasi moral tersendiri untuk membenarkan tindakannya. Menurutnya tindakan tersebut merupakan upaya untuk memulihkan kondisi alam yang telah dirusak oleh berbagai pihak, sehingga ia muncul sebagai individu yang beranggapan memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi alam dan warisan leluhur. Perbedaan pandangan antara tokoh Timur dan tokoh penyerang menunjukkan adanya benturan dua sistem nilai yang saling berlawanan. Timur menekankan pentingnya norma sosial dan nilai kemanusiaan dalam menyelesaikan konflik, sementara itu tokoh penyerang mencerminkan pandangan bahwa ketika sistem hukum formal gagal menegakkan keadilan kekerasan dipandang sebagai alternatif yang dapat dibenarkan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa konflik bersumber dari ketidakadilan struktural, seperti kerusakan lingkungan dan perampasan tanah adat yang dilakukan oleh pihak korporasi, sehingga individu terdorong untuk melakukan tindakan ekstrem yang pada akhirnya menciptakan konflik baru di atas konflik yang telah ada.

Kedua, konflik juga ditunjukkan melalui tindakan kekerasan yang terjadi sebagai akibat dari perselisihan yang terus berkembang dan tidak terselesaikan. Hal tersebut tampak pada kutipan data berikut.

Data 29

Mahzar melompat dan menghantam punggung Timur sampai genggamannya pada tangan Dima terlepas.

Kedua pria itu jatuh berguling, sementara Dima terpejal ke sisi kanan, ke sisi parit yang dialiri air hujan yang cukup deras. Lumpur di parit itu terciprat ke wajahnya dan memasuki mata. Dima memekik histeris sambil mengusap-usap mata dengan panik. (Welirang, 2023: 326)

Data tersebut dapat dimaknai bahwa konflik yang tidak terselesaikan dan terus berkembang pada akhirnya akan melahirkan konflik lain yang jauh lebih luas dan tidak terkendali. Serangan yang dilakukan Mahzar menunjukkan bahwa konflik telah sepenuhnya bergeser ke ranah kekerasan fisik yang nyata dan berbahaya, di mana setiap individu hanya berfokus pada upaya mempertahankan diri dari ancaman yang ada, sehingga yang tersisa hanyalah benturan langsung antara pihak-pihak yang saling berhadapan dengan kepentingan yang bertolak belakang. Mahzar sebagai pihak yang menyerang memilih kekerasan sebagai satu-satunya instrumen untuk memenangkan konflik, sementara Timur dan Dima berada dalam posisi yang harus merespons ancaman tersebut.

Ketiga, konflik antarindividu pada masyarakat Pasaman berkembang menjadi konflik antara masyarakat adat dengan korporasi. Hal tersebut tampak pada kutipan data berikut.

Data 39

PT Zamrud Bumi dikritik habis-habisan oleh warga. Perusahaan sawit itu dianggap melahirkan pembenci ekstrem yang mengancam nyawa karyawan mereka, yang hanya warga sipil yang tak tahu apa-apa dan membutuhkan mata pencaharian. Banyak warga dan orang luar Sumatra yang meminta agar perkebunan sawit, pembalak, serta pemburu ilegal ditindak lebih tegas. (Welirang, 2023: 367)

Data tersebut dapat dimaknai bahwa konflik yang terjadi di wilayah tersebut telah berkembang menjadi konflik antara masyarakat dengan institusi korporasi besar. PT Zamrud Bumi dianggap bertanggung jawab atas munculnya ancaman terhadap keselamatan publik. Kritik yang dilayangkan oleh warga kepada PT Zamrud Bumi menunjukkan kemarahan kolektif masyarakat telah meledak sebagai respons terhadap dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan perusahaan sawit tersebut di tengah kehidupan mereka. PT Zamrud Bumi sebagai entitas korporasi besar merepresentasikan kelompok yang memiliki kekuasaan ekonomi dan pengaruh yang signifikan, sementara warga masyarakat merepresentasikan kelompok yang berada di posisi lebih lemah secara struktural namun menanggung dampak langsung dari keberadaan korporasi tersebut. Konflik antara masyarakat dengan PT Zamrud Bumi merupakan hasil dari ketimpangan struktural. Masyarakat menyadari bahwa para karyawan yang menjadi korban ancaman tersebut hanyalah warga sipil biasa yang membutuhkan mata pencaharian. korban dan pelaku berada dalam jaringan kepentingan yang saling tumpang tindih.

Masyarakat yang selama ini berada dalam posisi subordinat akhirnya menggunakan kritik publik sebagai instrumen perlawanan terhadap dominasi korporasi yang mereka anggap telah melahirkan ancaman bagi keselamatan mereka.

b. Konsensus

Konsensus memandang masyarakat dapat bersatu karena adanya nilai kolektif yang disepakati untuk menciptakan dan menjaga kehidupan sosial yang harmonis. Dalam novel *Jejak Balak* karya Ayu Welirang, konsensus tercermin dalam berbagai kehidupan sosial tokoh-tokohnya, hingga kesepakatan formal antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal tersebut tampak pada kutipan data berikut.

Data 15

Mahzar mengangguk paham. "Betul sekali yang Mbak Dima katakan. Tapi perlu digarisbawahi bahwa meskipun jauh dari permukiman, daerah tersebut termasuk kawasan hutan adat yang dikelola bersama oleh pemerintah daerah dan masyarakat adat setempat. Pengelolaan kawasan tersebut sudah diatur di Permen Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1). Masyarakat setempat atas izin pemerintah daerah boleh memanfaatkan hutan wilayah tertentu sebagai mata pencaharian atau untuk mengambil manfaat dari tanaman yang tumbuh di hutan. Nah, selain itu, karena daerah ini juga menjadi habitat *Tectona grandis*, maka pemerintah daerah sepakat untuk membuka lahan bagi petani tanaman musiman untuk menanam di bawah tegakan jati. Umumnya, petani yang bekerja di kawasan ini memang datang sangat pagi." (Welirang, 2023: 113)

Data tersebut dapat dimaknai bahwa terdapat konsensus melalui regulasi formal antara pemerintah daerah dan masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan hutan. Berdasarkan penjelasan Mahzar yang merujuk pada Permen Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1), diketahui bahwa kesepakatan yang terbentuk tidak hanya bersifat informal atau berbasis tradisi, tetapi juga telah dilegitimasi melalui hukum resmi yang mengikat seluruh pihak terkait. Melalui kutipan tersebut, diketahui bahwa konsensus bekerja pada dua tingkat sekaligus. Pertama, pada tingkat formal melalui kebijakan pemerintah, memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk memanfaatkan kawasan hutan sebagai sumber pencaharian. Kedua, pada tingkat praktis melalui kesepakatan teknis antara pemerintah daerah dan para petani terkait pemanfaatan lahan di bawah tegakan jati.

Kedua bentuk konsensus ini saling mendukung sehingga menghasilkan sistem pengelolaan yang tertib dan berkelanjutan. Konsensus yang terbentuk dapat menyesuaikan berbagai kepentingan secara bersamaan. Pemerintah daerah berfokus pada pelestarian hutan adat, masyarakat adat mempertahankan hak ulayat, sementara petani musiman membutuhkan lahan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Melalui kesepakatan yang diformalkan dalam regulasi tersebut, berbagai kepentingan ini dapat diselesaikan tanpa menimbulkan kerugian sepihak. Dengan demikian, konsensus tidak hanya menciptakan keteraturan, tetapi juga menjaga keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang beragam. Hal tersebut tampak pada kutipan data berikut.

Data 05

"Lho? Kalian boleh memantau saluran HT dengan jarak pantau radio cukup luas? Memangnya legal?" Baru dua hari di Simpang Empat, Dima sudah mendapati berbagai hal mencengangkan.

"Legal di sini. Memang berbagai pihak ranger dan orang perhutani sering korespondensi. Begitu juga dengan pihak polisi hutan di bawah yurisdiksi Polres Pasaman Barat. Sinyal ponsel agak susah di daerah kami, jadi kenapa tidak boleh berkomunikasi pakai HT? Dengan begitu, kerja wartawan lokal juga jadi lebih cepat." (Welirang, 2023: 64)

Data tersebut dapat dimaknai bahwa terdapat konsensus dalam penggunaan saluran HT secara legal antara aparat, ranger, dan perhutani. Melalui konsensus tersebut, diketahui adanya kerja sama dalam pertukaran informasi yang mendukung pengawasan wilayah. Kesepakatan ini bertujuan sebagai sarana koordinasi untuk menjaga keteraturan sosial dan mempermudah pemantauan berbagai kegiatan yang ada di kawasan hutan. Melalui konsensus tersebut, keterbatasan sarana komunikasi tidak menjadi hambatan bagi pelaksanaan pengawasan wilayah sehingga informasi mengenai berbagai peristiwa di kawasan hutan dapat diperoleh dan disebarluaskan dengan lebih cepat. Oleh karena itu, kesepakatan penggunaan HT berperan sebagai alat kontrol sosial. Bagi aparat, kesepakatan ini memperluas jangkauan pengawasan mereka melalui wartawan di lapangan. Sebaliknya, bagi masyarakat dan jurnalis, akses informasi yang membuka membuat mereka lebih cepat memperoleh informasi yang akurat. Dengan demikian, konsensus dalam pertukaran informasi berfungsi menjaga stabilitas sosial dan mengurangi potensi berkembangnya ketegangan menjadi konflik yang lebih terbuka.

2. Kekuasaan dan Wewenang dalam Novel *Jejak Balak Karya Ayu Welirang*

a. Kekuasaan

Kekuasaan merupakan kemampuan suatu posisi dalam masyarakat untuk memaksakan kehendaknya, sekalipun mendapat perlawanan dari pihak lain. Tidak hanya kemampuan fisik, kekuasaan juga meliputi kemampuan untuk mengendalikan pihak lain untuk tujuan tertentu. Dalam kehidupan sosial modern, kekuasaan kerap bekerja tanpa melibatkan kekerasan yang kasat mata, seperti pembatasan informasi, intervensi pada media, hingga penyuapan. Dalam novel *Jejak Balak* karya Ayu Welirang, kekuasaan direpresentasikan melalui pengaruh finansial korporasi yang mampu membatasi kebebasan media dan membujuk aparat demi mencapai kepentingan pribadi. Hal ini tampak pada kutipan data berikut.

Data 20

Masalahnya PT Zamrud Bumi berkongkalikong dengan para petinggi media, menyumbangkan begitu banyak uang yang tak ingin mereka tolak, sehingga kasus-kasus pencemaran alam yang dilakukan perusahaan itu tidak banyak diberitakan ke masyarakat luas. Sekarang pun perusahaan tersebut menekan beberapa petinggi media agar tidak menjadikan kasus pembunuhan di lahan sawit mereka sebagai berita utama dan memastikan berita yang ditulis tidak mencoreng reputasi mereka. (Welirang, 2023: 196—197)

Data tersebut dapat dimaknai bahwa terdapat kongkalikong antara korporasi dengan petinggi media. PT Zamrud Bumi tidak menggunakan kekerasan fisik atau ancaman terbuka untuk mengendalikan pemberitaan, melainkan memanfaatkan kekuatan finansialnya untuk membungkam institusi yang seharusnya menjadi penjaga kebenaran dan kepentingan publik. Pemberian sumbangan uang dalam jumlah besar kepada para petinggi media menjadi instrumen kekuasaan yang efektif karena jauh dari jangkauan pengawasan publik. Akibatnya, para petinggi media yang menerima sumbangan tersebut berada dalam posisi sulit untuk menolak tekanan, karena penolakan berarti memutus aliran dana yang telah menjadi bagian dari kepentingan institusi mereka. Melalui strategi ini, PT Zamrud Bumi menggunakan kekuasaan ekonominya untuk memaksakan kehendak kepada institusi media. Dampak dari praktik kekuasaan tersebut terhadap masyarakat luas terlihat pada minimnya pemberitaan mengenai kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Zamrud Bumi. Bahkan, kasus pembunuhan di area perkebunan

mereka pun diupayakan agar tidak menjadi sorotan utama media. Pengendalian informasi ini menunjukkan bahwa kekuasaan PT Zamrud Bumi memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh diketahui oleh masyarakat. Dengan mengendalikan narasi yang beredar di ruang publik, PT Zamrud Bumi dapat melindungi reputasinya sekaligus mengamankan kepentingan bisnisnya dari ancaman opini publik yang negatif. Namun, bagi PT Zamrud Bumi pengendalian atas institusi media dianggap belum cukup untuk melindungi kepentingannya. Korporasi tersebut juga menggaet institusi negara yang seharusnya berperan sebagai aparat penegak hukum. Hal tersebut tampak pada data berikut.

Data 21

Selain dengan media, PT Zamrud Bumi juga punya pengaruh besar terhadap pemerintah. Menyuaip aparat negara untuk kepentingan perusahaan merupakan hal mudah. Seperti sekarang, perusahaan menyuaip beberapa petinggi kepolisian setempat agar polisi tidak dengan mudah memberikan informasi terkait kasus pembunuhan di lahan sawit kepada wartawan. Semakin sedikit berita yang beredar mengenai kasus ini, semakin baik. (Welirang, 2023: 197)

Data tersebut dapat dimaknai bahwa PT Zamrud Bumi memiliki pengaruh untuk mengendalikan kekuasaan formal di sekitarnya. Tidak cukup hanya dengan menguasai narasi media, perusahaan tersebut juga secara aktif menyusup ke dalam institusi pemerintahan dan kepolisian melalui suap yang diberikan kepada para petinggi setempat. Institusi negara yang seharusnya berfungsi sebagai penjaga keadilan dan kepentingan publik justru menjadi perpanjangan tangan dari kepentingan korporasi. Menurut PT Zamrud Bumi, praktik penyuaipan merupakan strategi yang efektif. Kemudahan perusahaan dalam menyuaip aparat negara menunjukkan bobroknya integritas institusi publik ketika berhadapan dengan kekuatan finansial korporasi besar. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa korupsi struktural telah mengakar kuat hingga melemahkan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang seharusnya melindungi kepentingan masyarakat.

b. Wewenang

Wewenang merupakan kemampuan untuk mengatur yang secara sukarela ditaati oleh kelompok tertentu karena dianggap sah. Tidak seperti kekuasaan yang dapat bekerja melalui paksaan atau tekanan, wewenang bersifat lebih terarah dan terbatas sesuai dengan konteks dan terikat pada posisi sosial yang

ditempati. Dalam wewenang terdapat pihak superior dan subordinat, di mana pihak superior yang memiliki legitimasi untuk memberikan perintah dan pihak subordinat yang diharapkan untuk mematuhi perintah tersebut. Hal tersebut tampak pada data berikut.

Data 25

“Jelaslah. Gue bakalan bantu supaya berita-beritanya gak terlalu disetir PT ZB. Gue usahakan investigasi yang kalian muat difokuskan murni untuk menghentikan lingkaran pembunuhan. Mau gimana juga, para pekerja yang jadi korban kan nggak salah apa-apa. Apa pun motif pem-bunuhnya, para pekerja perkebunan yang menjadi korban kan cuma cari uang dari mata pencahariaannya.” (Welirang, 2023: 250)

Data tersebut dapat dimaknai bahwa Dayat sebagai redaktur metro network akan menggunakan posisinya untuk memastikan agar pemberitaan tidak dikendalikan untuk kepentingan PT Zamrud Bumi. Dayat akan menggunakan wewenang redaksionalnya sebagai sarana untuk menolak campur tangan korporasi terhadap kebebasan media yang dipimpinnya. Tidak hanya itu, posisi Dayat sebagai superior dalam struktur redaksional membuatnya memperoleh legitimasi dan otoritas untuk menentukan arah pemberitaan, memilah konten yang layak dipublikasikan, dan melindungi para jurnalis dari tekanan pihak eksternal. Wewenang tersebut ia gunakan untuk mengimbangi pengaruh korporasi yang selama ini sanggup mengatur narasi media dengan kekuatan finansialnya.

Kedua, wewenang melekat pada posisi profesional yang diakui secara institusional. Dalam novel *Jejak Balak*, kondisi ini direpresentasikan oleh tokoh Mahzar. Hal tersebut tampak pada kutipan data berikut.

Data 08

Mahzar lantas menyahut. "Sebelum kalian datang, saya sudah bertanya kepada saksi yang pertama kali menemukan jenazah, juga kepada petugas yang datang duluan. Mereka bilang kedua korban diduga diterkam harimau. Identitas kedua korban juga belum diketahui karena kartu identitas korban tidak ditemukan, tapi dari kayu gelondongan di sekitar TKP, kedua korban diduga pembalak liar." (Welirang, 2023: 72—73)

Data tersebut dapat dimaknai bahwa Mahzar memiliki wewenang sebagai staf ahli konservasi Dinas Kehutanan Pasaman. Wewenang tersebut berasal dari posisinya dalam struktur kelembagaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan,

bukan dari kemampuan pribadi. Posisi tersebut memberinya legitimasi untuk mengulik informasi, melakukan klarifikasi kepada saksi, dan menyampaikan kesimpulan awal yang dapat dijadikan dasar bagi pihak lain dalam proses penyelidikan selanjutnya. Hal tersebut dapat diketahui dari kemampuannya mengumpulkan informasi secara langsung dari saksi yang pertama kali menemukan jenazah dan petugas yang lebih awal berada di lokasi kejadian. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Mahzar kemudian menyampaikan dugaan awal penyebab kematian korban dan identitas mereka sebagai pembalak liar. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa Mahzar memiliki hak yang diakui secara formal untuk melakukan penyelidikan awal dan menyampaikan penilaian terkait peristiwa yang terjadi di wilayahnya.

Ketiga, dalam novel *Jejak Balak*, wewenang juga direpresentasikan dalam bentuk otoritas hukum yang diperoleh melalui prosedur formal negara. Hal tersebut tampak pada kutipan data berikut.

Data 37

"Kasus naik ke tahap penyidikan sebagai kasus pembunuhan serial. Surat putusan sudah turun dari pengadilan," ujar Adri sembari mengangkat ponselnya untuk menunjukkan surat penggeledahan dan penyidikan. "Pelaku berinisial MA, berusia 36 tahun, dan pegawai Dinas Kehutanan angkatan 2008. Dua wartawan yang terakhir kali berkomunikasi dengan MA hilang sejak kemarin, kemungkinan mereka ditawan. Cari mereka di sekitar hutan, tapi tetap perhatikan keamanan dan keselamatan kedua tawanan MA." (Welirang, 2023: 344)

Data tersebut dapat dimaknai bahwa terdapat peningkatan status kasus ke tahap penyidikan pembunuhan berantai yang telah mendapat pengesahan dari pengadilan. Tindakan mengangkat ponsel yang dilakukan oleh Adri untuk memaparkan surat tersebut kepada seluruh tim menunjukkan bahwa setiap tindakan yang diambil berdasar pada hukum yang sah dan tidak dapat diperdebatkan oleh pihak lain. Surat keputusan dari pengadilan tersebut menjadi sumber legitimasi tertinggi yang mendukung wewenang Adri dan tim untuk bertindak secara komprehensif dalam penanganan kasus tersebut.

3. Kelompok yang Terlibat dalam Novel *Jejak Balak* Karya Ayu Welirang

a. Kelompok Semu

Kelompok semu merupakan sekumpulan individu yang memiliki kepentingan sama, tetapi belum memiliki kesadaran kolektif maupun struktur organisasi yang mengatur secara jelas. Dalam novel *Jejak Balak* karya

Ayu Welirang, kelompok semu tercermin dalam berbagai situasi. Hal tersebut tampak pada kutipan data berikut.

Data 10

"Saya dengan berat hati harus mengumumkan kalau akhir minggu ini adalah akhir dari Kaba Jorong cetak," jawab Syafi langsung.

Sebagian besar wartawan terkesiap terkejut, ada juga yang tidak. Bisik-bisik tentu saja tidak terhindarkan.

Tuh kan, apa kubilang?" bisik Teti sembari mengempaskan tubuh ke sandaran kursi. (Welirang, 2023: 82)

Data tersebut dapat dimaknai bahwa terdapat kelompok semu dalam kumpulan wartawan yang menerima pengumuman penghentian kabar jorong versi cetak. Meskipun mereka menerima informasi yang sama, reaksi yang muncul masih bersifat individual dan belum menunjukkan adanya kesadaran kolektif yang sama mengenai situasi yang sedang berlangsung. Pada tahap ini, para wartawan masih berada dalam fase awal pembentukan kesadaran yang belum memiliki arah, struktur, maupun tujuan bersama yang jelas. Kesamaan nasib yang mereka alami berpotensi menjadi dasar terbentuknya tindakan kolektif di kemudian hari. Namun, tetap diperlukan faktor pemicu yang mampu mengubah kesamaan kepentingan tersebut menjadi aksi bersama yang terarah dan terorganisasi.

Kedua, kelompok semu ditunjukkan oleh masyarakat adat yang mengalami kekalahan pembebasan lahan dengan pihak korporasi sehingga diperlukan strategi yang efektif dalam melawan dominasi yang ada. Hal tersebut tampak pada data berikut.

Data 12

Pada awal proses pembukaan lahan untuk perkebunan sawit, kelompok pengembang sempat menerima perlawanan dari masyarakat adat sekitar. Namun, entah lewat jalur apa, pihak PT Zamrud Bumi berhasil memenangkan pembebasan lahan dan menyisakan isak tangis warga yang masih mencintai hutan adat mereka. (Welirang, 2023: 103)

Data tersebut dapat dimaknai bahwa masyarakat adat yang mencapai kelompok konflik direduksi menjadi kelompok semu. Hal ini terlihat dari adanya perlawanan masyarakat adat mengenai pembukaan lahan perkebunan sawit yang mengancam keberadaan hutan adat mereka. Namun, perlawanan tersebut tidak dapat menghentikan proses pembebasan lahan yang dimenangkan oleh pihak korporasi. Adanya isak tangis warga menunjukkan

kesamaan kepentingan dan rasa kehilangan yang dimiliki oleh masyarakat adat. Mereka menyadari ancaman terhadap ruang hidup dan sumber penghidupan mereka, tetapi kesadaran tersebut belum berkembang menjadi gerakan kolektif yang terorganisir dan memiliki kekuatan yang memadai. Akibatnya, posisi masyarakat adat tetap berada di pihak yang lemah sehingga tidak mampu menandingi kekuatan dan pengaruh yang dimiliki oleh korporasi dalam proses pembebasan lahan.

Ketiga, kelompok semu juga tercermin melalui para buruh ekskavasi yang memiliki kesamaan posisi sebagai pekerja lapangan, tetapi belum menunjukkan tindakan kolektif yang terorganisir. Hal tersebut tampak pada kutipan data berikut.

Data 13

Dia duduk dan berkali-kali mengecek arloji. Sepertinya, orang yang dia tunggu tak juga hadir. Dia bermaksud menunggu sampai tiga puluh menit ke depan dan pulang saja kalau tak ada bala bantuan. Padahal, jadwal untuk ekskavasi lahan sudah dekat dan pasak-pasak kepemilikan harus segera dipasang.

Nyamuk-nyamuk hutan tropis mulai menghampiri. Pria itu kesal, tapi apa mau dikata. Memang begini nasib buruh ekskavasi. (Welirang, 2023: 103)

Data tersebut dapat dimaknai bahwa terdapat seorang buruh ekskavasi yang menunggu kedatangan rekan kerjanya untuk memulai pemasangan pasak kepemilikan lahan. Ungkapan 'memang begini nasib buruh ekskavasi' menunjukkan adanya kesadaran persamaan nasib yang dialami bersama. Namun, kesadaran tersebut belum berkembang menjadi ambisi yang menciptakan usaha bersama guna mendukung perubahan kondisi kerja. Para buruh sebenarnya memiliki kebutuhan yang sama, seperti kepastian kerja dan tambahan tenaga bantuan, tetapi kepentingan tersebut masih bersifat individu dan belum disampaikan secara transparan. Perasaan tersebut belum berubah menjadi tuntutan bersama. Dengan demikian, meskipun terdapat kesadaran kelas tanpa adanya tindakan kolektif, kesadaran tersebut belum cukup untuk mengubah kelompok semu menjadi kelompok nyata.

b. Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan merupakan sebuah kelompok yang memiliki tujuan dan struktur organisasi yang jelas, dan memiliki anggota yang tetap. Kelompok kepentingan mampu mengubah dari sekedar kesadaran kepentingan bersama menjadi gerakan yang terstruktur dan terarah. Hal tersebut tampak pada data berikut.

Data 26

Saat aku meminta kesaksian Agam, dia bilang pelaku memakai celana kargo dua saku di kanan dan kiri paha. Selain itu, di kemeja safarinya ada logo Pasaman Saiyo," jelas Adri.

"Berarti kemungkinan besar pelakunya petugas Dinas Kehutanan? Gila. Gimana caranya mengerucutkan daftar pelakunya. Semua orang Dinas Kehutanan kan pakai baju itu."

Timur terdiam, berusaha mencerna semua yang Adri katakan. "Berarti pelakunya..."

"Ya. Aku akan segera menyiapkan pasukan untuk ke sana dan-"

"Kalau gitu, aku harus cepat-cepat!" seru Timur memotong Adri. (Welirang, 2023: 303)

Data ini dapat dimaknai bahwa terbentuk kelompok kepentingan antara Adri dan Timur. Kedua tokoh tersebut memiliki tujuan yang sama dan jelas, yakni menangkap pelaku pembunuhan yang dicurigai berasal dari pihak Dinas Kehutanan. Persamaan tujuan tersebut memicu mereka untuk bergerak secara terstruktur. Adri bergerak melalui jalur kepolisian, sedangkan Timur melalui investigasi jurnalistik. Berdasarkan kondisi tersebut, diketahui bahwa kelompok kepentingan dapat terbentuk dengan cepat apabila terdapat kesadaran dan tujuan yang sama terhadap situasi tertentu.

Kedua, kelompok kepentingan juga ditunjukkan melalui adanya koordinasi dan pembagian tugas yang jelas dalam proses investigasi. Hal tersebut tampak pada kutipan data berikut.

Data 34

Dia lalu melanjutkan, "Awak sudah hubungi forensik Polres juga untuk memeriksa sidik jari. Bagaimana, Bang Adri?"

"Amankan dulu. Awak hubungi tim awak yang lainnya untuk bantu investigasi bersama forensik. Soalnya awak ada hal lain yang harus dilakukan," balas Adri cepat dan berjalan kembali kepada Teti serta Patra dan Galih. (Welirang, 2023: 341)

Data tersebut dapat dimaknai bahwa terdapat kelompok kepentingan yang terbentuk dalam proses investigasi kasus. Hal tersebut dapat diketahui dari koordinasi yang dilakukan Adri bersama anggota timnya dan keterlibatan berbagai pihak, seperti tim investigasi dan tim forensik, dalam mencapai tujuan yang sama. Pernyataan Adri untuk menghubungi anggota tim lainnya

menunjukkan adanya struktur organisasi, pembagian tugas, dan mekanisme kerja yang telah disepakati oleh seluruh anggota kelompok. Sementara itu, instruksi untuk mengamankan barang bukti dan melakukan pemeriksaan sidik jari menunjukkan bahwa setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang saling mendukung. Dengan adanya pembagian peran tersebut, kelompok ini dapat berjalan secara terorganisir untuk mengumpulkan bukti, mengungkapkan fakta, dan mencapai tujuan investigasi yang telah ditetapkan.

c. Kelompok Konflik

Kelompok konflik merupakan kelompok kepentingan yang mulai melakukan tindakan untuk melawan kelompok lain dengan tujuan memenangkan kepentingan mereka. Pada novel, kelompok konflik ditunjukkan melalui demonstrasi antara masyarakat dan pihak korporasi. Hal tersebut tampak pada data berikut.

Data 11

Hutan yang dia singgahi kali ini dekat dengan hutan masyarakat adat sekitar. Hutan semacam ini terkadang disebut hutan ulayat atau hutan pertuanan yang masih dimiliki masyarakat adat dan dikelola negara. Pada awal proses pembukaan lahan untuk perkebunan sawit, kelompok-pok pengembangan sempat menerima perlawanan dari masyarakat adat sekitar. (Welirang, 2023: 103)

Data tersebut dapat dimaknai bahwa perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat adat menunjukkan terbentuknya kelompok konflik. Berdasarkan perlawanan tersebut, dapat diketahui adanya tindakan kolektif masyarakat adat dalam menentang pembukaan lahan sawit yang dianggap mengancam. Masyarakat adat tidak lagi berada pada tahap kesadaran akan kepentingan bersama, melainkan telah melakukan tindakan nyata untuk mempertahankan hak atas wilayah yang mereka tempati. Dalam struktur konflik ini, korporasi menempati posisi sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam pengelolaan lahan, sedangkan masyarakat adat menjadi kelompok yang berusaha mempertahankan kepentingan-nya. Berdasarkan kondisi tersebut, diketahui bahwa konflik bersifat manifes karena telah diwujudkan melalui tindakan secara langsung. Dengan demikian, kelompok konflik ini muncul karena adanya pertentangan kepentingan antara kelompok yang memiliki otoritas dengan kelompok yang berada di posisi subordinat. Data lain tampak pada kutipan berikut.

Data 41

Masyarakat umum dan masyarakat adat berdemonstrasi hampir setiap hari. Mereka menuntut hak masyarakat adat, yaitu tanah ulayat yang pengelolaannya diatur dalam undang-undang. Tanah tersebut akan digunakan warga untuk bertani dan swasembada pangan. Masyarakat adat juga mengecam keras para tetua adat yang memanfaatkan keuntungan ekonomi dan menjual sebagian tanah ulayat tanpa musyawarah dengan kelompok serta tetua adat lainnya. (Welirang, 2023: 368)

Data tersebut dapat dimaknai bahwa masyarakat adat dan masyarakat umum berkolaborasi menjadi kelompok konflik yang terorganisir dan terlibat secara aktif dalam perlawanan terbuka terhadap dominasi korporasi. Melalui aksi demonstrasi tersebut, diketahui adanya komitmen yang kuat untuk memperjuangkan hak tanah adat yang telah diakui oleh Undang-Undang. Berdasarkan kondisi tersebut, diketahui bahwa kelompok konflik terbentuk ketika terdapat kesamaan kepentingan, kemudian berkembang menjadi tindakan perlawanan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama yang jelas.

4. Pengendalian Konflik dalam Novel *Jejak Balak* Karya Ayu Welirang

Dalam novel *Jejak Balak*, proses pengendalian konflik dilakukan dengan cara arbitrase. Arbitrase idealnya dilakukan secara transparan, netral, dan berfokus pada keadilan bagi semua pihak yang terlibat, bukan berpihak kepada pihak tertentu yang memiliki kekuasaan lebih besar. Dalam novel *Jejak Balak* karya Ayu Welirang, bentuk arbitrase tampak pada kutipan berikut.

Data 22

"Intinya ada masalah izin juga. Izin pelepasan lahan untuk area perluasan sawit ini sebenarnya belum benar-benar turun, tapi entah bagaimana caranya, perusahaan bisa melewati birokrasi izin dari DPRD. Mereka bahkan sudah siap-siap memasang pasak pembatas dan plang "Tanah ini Milik PT Zamrud Bumi," ujar Mahzar. (Welirang, 2023: 223)

Data tersebut dapat dimaknai bahwa DPRD dan birokrasi perizinan yang seharusnya berperan sebagai lembaga formal yang mengawasi dan mengatur proses pelepasan lahan secara adil tidak berjalan dengan semestinya. Keberhasilan PT Zamrud Bumi untuk tetap melakukan persiapan lahan melalui pemasangan pasak pembatas dan plang kepemilikan, meskipun izin belum

diterbitkan secara resmi, menunjukkan adanya penyimpangan dalam proses arbitrase. Hal tersebut membuat konflik semakin berkembang karena masyarakat melihat adanya ketimpangan perlakuan yang menguntungkan pihak pemegang kekuasaan dan modal. Dengan demikian, proses pengendalian konflik yang dijalankan tidak sesuai dengan prinsipnya karena pihak ketiga yang memiliki otoritas tidak mampu mempertahankan netralitas dan legitimasi dalam penyelesaian konflik. Data lain tampak sebagai berikut.

Data 38

Artikel yang tayang mendapatkan eksposur cukup tinggi dari warganet. Kemudian, artikel lainnya yang membahas tentang temuan pelaku sebenarnya juga dijadwalkan untuk ditayangkan keesokan harinya. Atas dasar tidak ditemukannya jenazah Mahzar, pihak kepolisian serta perusahaan sawit memutuskan sepakat menutup kasus tersebut dengan cepat. (Welirang, 2023: 366)

Data tersebut dapat dimaknai bahwa tidak ditemukannya jenazah Mahzar membuat pihak kepolisian dan korporasi menutup kasus. Mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip pengendalian konflik yang ideal. Meskipun pihak kepolisian menetapkan keputusan yang bersifat mengikat, tetapi hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai arbitrase yang sah. Arbitrase menuntut adanya pihak ketiga yang netral dan pengakuan kedua belah pihak yang berkonflik. Pada kasus ini arbitrase dipaksakan oleh otoritas untuk melindungi kelompok superior, yakni korporasi. Penutupan kasus secara sepihak oleh pihak kepolisian menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum lebih memilih untuk menekan konflik daripada menyelesaikan secara transparan. Penyimpangan fungsi tersebut berpotensi menimbulkan konflik baru dengan skala yang lebih besar.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa novel *Jejak Balak* karya Ayu Welirang memuat konflik sosial yang berkaitan erat dengan kekuasaan dan wewenang, sebagaimana yang dijelaskan dalam teori konflik Ralf Dahrendorf.

Pertama, dua wajah masyarakat dalam novel *Jejak Balak* karya Ayu Welirang direpresentasikan melalui konsensus dan konflik yang hadir secara beriringan. Konflik hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari konflik antarindividu, konflik akibat kerusakan lingkungan, hingga perlawanan masyarakat adat terhadap dominasi korporasi. Konflik tersebut disebabkan oleh adanya

ketimpangan struktural, perampasan tanah ulayat, dan eksploitasi sumber daya alam yang mengancam kehidupan masyarakat Pasaman. Di sisi lain, konsensus direpresentasikan melalui kesepakatan antara pemerintah daerah dengan masyarakat adat dalam pengelolaan tanah ulayat dan kerja sama berbagai pihak dalam pertukaran informasi. Dengan demikian, diketahui bahwa kehidupan sosial masyarakat dalam novel ini tidak hanya dibangun oleh pertentangan kepentingan, tetapi juga oleh kesepakatan yang berfungsi menjaga stabilitas sosial.

Kedua, kekuasaan dan wewenang dalam novel saling berkaitan dalam membentuk dinamika sosial masyarakat Pasaman. Kekuasaan direpresentasikan melalui dominasi korporasi yang memanfaatkan kekuatan ekonomi untuk memengaruhi media dan aparat negara demi melindungi kepentingan perusahaan. Sementara itu, wewenang direpresentasikan melalui posisi-posisi yang memiliki legitimasi formal, seperti redaktur media, staf ahli kehutanan, dan aparat kepolisian yang menjalankan tugas berdasarkan aturan hukum yang sah. Berdasarkan temuan tersebut, diketahui bahwa kekuasaan cenderung digunakan untuk melaksanakan kepentingan tertentu, sedangkan wewenang dijalankan berdasarkan legitimasi yang diakui dalam struktur sosial dan kelembagaan.

Ketiga, kelompok yang terlibat dalam novel terdiri dari kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok konflik. Kelompok semu direpresentasikan oleh wartawan, buruh ekskavasi, dan masyarakat adat yang memiliki kesamaan nasib dan kepentingan, tetapi belum memiliki organisasi dan tindakan kolektif yang terarah. Kelompok kepentingan direpresentasikan oleh individu dan institusi yang memiliki tujuan bersama dan melakukan koordinasi secara terstruktur dalam proses investigasi. Sementara itu, kelompok konflik direpresentasikan oleh masyarakat adat dan masyarakat umum yang secara aktif melakukan perlawanan terhadap dominasi korporasi dalam memperjuangkan hak atas tanah ulayat. Dengan demikian, diketahui bahwa proses perkembangan kelompok sosial dari kesadaran akan kepentingan bersama hingga menjadi kelompok yang terlibat secara langsung dalam konflik terbuka direpresentasikan dalam novel ini.

Keempat, pengendalian konflik dalam novel direpresentasikan melalui mekanisme arbitrase yang tidak berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan netralitas. Lembaga yang seharusnya berperan sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian konflik justru menunjukkan keberpihakan kepada kelompok yang memiliki dominasi lebih besar, yakni korporasi. Penyimpangan tersebut terlihat pada proses perizinan pelepasan lahan yang tidak berjalan sesuai prosedur dan penutupan kasus pembunuhan Mahzar secara sepihak. Akibatnya, konflik tidak terselesaikan secara tuntas dan

berpotensi menciptakan konflik baru yang lebih luas. Oleh karena itu, novel *Jejak Balak* menunjukkan bahwa pengendalian konflik yang tidak dilaksanakan secara adil justru dapat memperkuat ketimpangan sosial dan mempertahankan dominasi kelompok superior terhadap kelompok subordinat.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji novel *Jejak Balak* karya Ayu Welirang dengan menggunakan perspektif atau teori lain sehingga diperoleh sudut pandang yang lebih beragam mengenai representasi konflik sosial dalam novel tersebut. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperluas objek kajian pada karya-karya sastra lain yang mengangkat persoalan konflik sosial, masyarakat adat, maupun relasi kekuasaan sehingga dapat dilakukan perbandingan mengenai bentuk dan dinamika konflik dalam karya sastra Indonesia.

Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami representasi konflik sosial, kekuasaan, wewenang, dan dinamika kelompok sosial sebagaimana dijelaskan dalam teori konflik Ralf Dahrendorf. Dengan demikian, pembaca tidak hanya memahami konflik sebagai pertentangan antarkelompok, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial yang dapat mendorong perubahan dalam masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Agnes, A. .. 2024. "Novel Jejak Balak Karya Ayu Welirang: Kajian Formula Cawelti." Universitas Andalas.
- Amanda, Amelia, and Akhmad Fatoni. 2025. "Konflik Sosial dalam Novel Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori (Sebuah Analisis Sosiologi Sastra)." *Jurnal Pendidikan Prapanca* 1(1). <https://prapanca.or.id/index.php/jpn/article/view/1>
- Anindita, R. 2025. "Konflik Tanah Ulayat dalam Novel Jejak Balak Karya Ayu Welirang (Tinjauan Sosiologi Sastra)." Universitas Andalas.
- Dahrendorf, Ralf. 1986. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisa Kritik*. 1st ed. edited by A. Mandan. Jakarta: Rajawali Press.
- Faruk. 2020. *Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal*. 5th ed. edited by R. Widada. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghuffran, Mohammad, Dinda Adistya Nugraha, and Nita Nilan Sry Rezki Pulungan. 2024. "Analisis Kasus Pulau Rempang di Batam Ditinjau Dari Conflict Theory." *Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5(2):392–403. doi: <https://doi.org/10.55357/is.v5i2.626>.
- Parmin, Jack. 2016. "Pendekatan dalam Penelitian Sastra." P. 22 in *Pendekatan dalam penelitian sastra. Dalam Prosiding Seminar Nasional Sastra Indonesia (SENASI) 2 dengan tema "Sastra dan Industri Kreatif."* Universitas Negeri Surabaya.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2015. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. 6th ed. Jakarta: PT Grasindo.
- Tualeka, M. Wahid Nur. 2017. "Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern." *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 3(1):32–48. doi: <https://doi.org/10.30651/ah.v3i1.409>.
- Welirang, Ayu. 2023. *Jejak Balak*. 1st ed. edited by V. Adinda. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.